

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi di Papua dimulai dari era kemerdekaan Indonesia. Terjadi perbedaan pendapat antara Soekarno dan Mohammad Yamin yang berargumen bahwa Papua harus menjadi bagian dari Indonesia karena menjadi bekas jajahan Belanda. Sementara hal tersebut ditentang oleh Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa Papua adalah bangsa yang independen.<sup>1</sup> Negosiasi yang dilakukan sewaktu Konferensi Meja Bundar agar Papua menjadi wilayah Indonesia mengalami penundaan dan akhirnya berujung dengan seruan Trikora oleh Soekarno untuk melawan Belanda.

Konfrontasi antara Indonesia-Belanda akhirnya diselesaikan lewat meja perundingan dan salah satu kesepakatan yang dicapai adalah diadakannya Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada 1969. Hasil keputusan melalui Pepera yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2506/1969, menyatakan Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia dan bersifat final.<sup>2</sup> Kesepakatan Pepera yang dimenangkan oleh Indonesia, ditentang oleh sebagian masyarakat Papua karena banyak masyarakat Papua yang tidak terlibat sepenuhnya

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Histori.id, (2016), diakses pada 03 Agustus 2022, <https://histori.id/sejarah-organisasi-papua-merdeka-opm/>

<sup>2</sup> CNN Indonesia, (2019), diakses pada 03 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190913121912-106-430189/di-pbb-indonesia-tegaskan-mustahil-ulangi-referendum-papua>

dalam kesepakatan tersebut dan dianggap tidak sah karena intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua.<sup>3</sup>

Setelah reformasi, Irian Jaya atau Papua terbagi atas dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Masyarakat yang cenderung menuntut kemerdekaan adalah masyarakat Papua Barat.<sup>4</sup> Isu Papua bukan hanya menjadi persoalan domestik saja, namun telah berkembang menjadi isu internasional. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari peran negara-negara di Pasifik Selatan terkhusus Vanuatu, yang berupaya untuk menginternasionalisasikan isu tersebut, serta memfasilitasi gerakan-gerakan pro Papua merdeka untuk dapat melepaskan diri dari Indonesia. Vanuatu merupakan salah satu negara yang mengajak negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan ras yang sama yaitu Melanesia untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) dari Indonesia.

Dengan mengangkat pelanggaran isu non-tradisional seperti HAM di forum-forum internasional, Vanuatu berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat internasional, terkhusus para aktivis HAM dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.<sup>5</sup> Vanuatu merupakan negara yang paling vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Papua dari Indonesia dan dengan tegas mendukung gerakan-gerakan pro Papua merdeka. Dengan alasan memiliki persamaan ras Melanesia (*Melanesian Brotherhood*), Vanuatu memberi dukungan dalam bentuk memfasilitasi organisasi

---

<sup>3</sup> John Saltford, (2003), *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal*, London: RoutledgeCurzon, hal. 72.

<sup>4</sup> David Robie, (2013), *Conflict reporting in the South Pacific: A critical reflexive approach to Timor-Leste and West Papua*, Media Asia, 40:2, hal. 148. DOI: 10.1080/01296612.2013.11689963.

<sup>5</sup> Ahmad Sabir, (2018), Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, Jurnal Hubungan Internasional, vol. 11, no. 1, hal. 95.

separatis yang dikenal dengan nama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).<sup>6</sup>

ULMWP dibentuk di Port Vila, Vanuatu pada tahun 2014. Terbentuknya ULMWP difokuskan untuk memperjuangkan isu kemerdekaan Papua Barat ke level internasional. Organisasi tersebut merupakan gabungan dari tiga organisasi terdahulu yang memiliki visi yang sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua yaitu Parlemen Nasional Papua Barat atau National Parliament West Papua (NPWP), Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Organisasi tersebut juga diikuti oleh negara-negara anggota yang tergabung dalam MSG.<sup>7</sup> Seiring dengan berjalannya waktu, seluruh negara-negara anggota MSG menyepakati bahwa isu mengenai kemerdekaan Papua merupakan fokus utama pembahasan organisasi tersebut.

Terbentuknya ULMWP adalah sebagai media untuk dapat memperjuangkan Papua sebagai anggota tetap di MSG, namun bukan sebagai representatif dari Indonesia, dan selanjutnya memperjuangkan hak Papua untuk dapat menentukan nasibnya sendiri sampai memperoleh kemerdekaan.<sup>8</sup> Atas dukungan dan sambutan baik Vanuatu dan Kepulauan Solomon akan kehadiran organisasi separatis tersebut, akhirnya ULMWP berhasil diterima sebagai pengamat di MSG pada tahun 2015.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Pratama Dinul Kusuma, Ganjar Widhiyoga, Andika Drajat Murdani, (2021), Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua, Jurnal Pena Wimaya, vol. 2, no. 1, hal. 52.

<sup>8</sup> Dwiki Nurhapsari dan Sudibyo, (2020), *Vanuatu's Internationalization toward Papua Case and Indonesia's Diplomacy*, The International Journal of Humanities & Social Studies, vol. 8, issue. 5, hal. 106, DOI No.: 10.24940/theijhss/2020/v8/i5/HS2005-030.

Adapun hak yang dimiliki oleh ULMWP sebagai pengamat di MSG adalah memberikan pendapatnya, jika dibutuhkan oleh sekretariat MSG dan tidak memiliki akses penuh terhadap dokumen-dokumen yang bersifat rahasia.

Oleh karena itu, Vanuatu terus memperjuangkan ULMWP untuk bisa menjadi anggota tetap di MSG agar kemerdekaan Papua dapat terealisasi. Kehadiran ULMWP bagi beberapa masyarakat Papua merupakan bentuk dukungan untuk meraih kemerdekaan Papua, namun bagi Indonesia organisasi tersebut merupakan sebuah ancaman yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Secara intensif ULMWP mengkampanyekan kemerdekaan Papua dengan mengangkat peristiwa Pepera kemudian berlanjut dengan menggiring isu penangkapan aktivis pro Papua merdeka, hingga kepada berita-berita palsu yang tersebar di media sosial.<sup>10</sup>

Dengan mengangkat isu-isu non-tradisional seperti HAM, kelompok-kelompok separatis Papua berhasil membuka kantor-kantor perwakilan kelompok tersebut di berbagai negara seperti, kantor perwakilan OPM di Australia (Perth), Belanda (The Hague), Inggris (Oxford) dan Papua Nugini (Port Moresby) serta kantor ULMWP yang berada di Vanuatu (Port Vila). Vanuatu merupakan salah satu negara anggota dari organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). Melanesian Spearhead Group merupakan organisasi sub regional yang berdiri pada tahun 1988 dan mendapatkan pengakuan sebagai organisasi internasional pada tahun 2007.

Anggota yang tergabung dalam MSG adalah Fiji, Papua Nugini, gerakan pro kemerdekaan Kaledonia Baru, Front de Liberation Nationale Kanak et

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 107.

Socialiste (FLNKS), Kepulauan Solomon dan Vanuatu.<sup>11</sup> Berbeda dari organisasi-organisasi regional di kawasan lainnya, terbentuknya organisasi tersebut tidak luput dari faktor-faktor yang terkait dengan sejarah regionalisme di kawasan Pasifik Selatan. *Pertama*, kerjasama regional yang dibangun lebih didorong atas dasar keterpencilan, ketersebaran geografis, kurangnya sumber daya serta ketidakberdayaan ekonomi. *Kedua*, regionalisme di kawasan tersebut didominasi oleh identitas serta persaingan yang ketat antara Micronesia, Polinesia dan Melanesia. Ketiga, kerjasama regional tersebut, secara fungsional dibentuk agar memperkuat suara negara-negara tersebut, akibat dari faktor yang telah disebutkan sebelumnya (keterpencilan, ketersebaran geografis, kurangnya sumber daya dan ketidakberdayaan ekonomi).

Dengan adanya organisasi regional tersebut, suara yang mereka angkat secara kolektif akan lebih diperhatikan masyarakat internasional.<sup>12</sup> Selain itu Vanuatu juga berupaya untuk menggalang dukungan dari negara-negara Pasifik lainnya dengan memanfaatkan organisasi MSG. Organisasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat di kawasan Pasifik, untuk itu MSG dipakai sebagai media sebagai perpanjangan suara perjuangan gerakan ULMWP ke tingkat internasional. Secara sepakat setiap anggota-anggota yang tergabung ke dalam MSG, membantu menyuarakan perjuangan kemerdekaan Papua Barat melalui media massa masing-masing negara dan melalui forum-forum internasional.

---

<sup>11</sup> Tess Newton-Cain, (2015), *The renaissance of the Melanesian Spearhead Group in The New Pacific Diplomacy*, The Australian National University Press, Australia, hal. 152.

<sup>12</sup> Baiq. L.S.W. Wardhani, (2015), *Quo Vadis Melanesian Spearhead Group?*, *Global Strategis*, vol. 9, no. 2, hal. 191-192.

Sampai saat ini Vanuatu masih tetap konsisten dan berpihak dalam mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Beberapa peristiwa yang memperlihatkan konsistensi Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua adalah pada sidang tahunan Majelis Umum PBB ke 71, yang menyatakan keprihatinan Vanuatu terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua serta mendorong kebebasan atas Papua untuk bisa menentukan nasib sendiri. Berlanjut pada sidang Dewan HAM PBB ke 34, dimana Vanuatu membacakan pernyataan atas nama tujuh negara yang berada di kawasan Pasifik yang berisi desakan kepada PBB untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.<sup>13</sup>

Hingga pada 2020 yang lalu, Vanuatu kembali menyinggung mengenai pelanggaran HAM di Papua pada forum sidang Dewan HAM PBB. Pada setiap kesempatan, negara-negara Melanesia akan berusaha untuk mengangkat kasus Papua sebagai bahan pembahasan di forum-forum internasional. Negara-negara tersebut terlihat kurang lebih selalu sama membahas mengenai terjadinya pelanggaran HAM yang terkait dengan ketidakadilan sosial ekonomi, adanya diskriminasi ras, kerusakan lingkungan hingga dominasi militer Indonesia di tanah Papua.<sup>14</sup>

Sebuah suku atau kelompok akan membantu sesama anggota suku maupun kelompoknya yang sedang mengalami kesulitan. Begitulah prinsip yang dibangun

---

<sup>13</sup> Ahmad Sabir, (2018), Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 11, no. 1, hal. 96.

<sup>14</sup> Andreas Brian Bagaskoro Bayuseno, Reni Windiani, (2020), Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional, *Politica*, vol. 11, no. 2, hal. 205, DOI: 10.22212/jp.v11i2.1668.

oleh negara-negara Melanesia ketika melihat Papua Barat yang berjuang melepaskan diri dari Indonesia. Satu orang Melanesia merepresentasikan orang Melanesia lainnya. Sehingga jika terdapat satu orang Melanesia yang menderita, maka orang Melanesia lainnya juga akan merasa menderita karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan, ini merupakan filosofi awal dari *The Melanesian Way*. Prinsip untuk menolong sesama ras Melanesia ini tertuang ke dalam *The Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia*, yang merupakan dasar terbentuknya MSG. Negara-negara Melanesia melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua. Sehingga dengan sudut pandang ras Melanesia, Papua layak untuk bisa ‘bebas’ mengatur nasib dirinya sendiri, mengatur dan mengelola sumber daya alamnya sendiri, menikmati alam sendiri dan berhak lepas dari bayangan orang-orang asing.<sup>15</sup>

Vanuatu secara konsisten terus mengupayakan kemerdekaan Papua dari Indonesia dengan menggunakan media seperti organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan yaitu MSG. Pastinya ada kepentingan Vanuatu sendiri dibalik gencarnya negara tersebut dalam memerdekakan Papua dari Indonesia. Penulis memfokuskan penelitian ini kepada apa kepentingan Vanuatu terhadap upayanya menginternasionalisasikan isu Papua melalui MSG. Alasan dari penulis pentingnya mengkaji topik ini, karena Vanuatu sebagai negara yang terletak di Pasifik Selatan dan secara keras menyuarakan isu Papua sampai kepada forum-forum internasional.

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 215.

Dengan begitu penulis hendak meneliti maksud dan tujuan tertentu dibalik semua upaya yang dilakukan Vanuatu, apakah murni hanya untuk membantu memerdekakan Papua dari Indonesia, atau segala upaya yang dilakukan Vanuatu hanya untuk mendapatkan perhatian dari Indonesia, atau ketika Papua berhasil merdeka maka Vanuatu akan menjadikan Papua sebagai mitra dagangnya mengingat sumber daya alam yang dimiliki Papua sangat kaya, atau dengan diangkatnya kasus ini Vanuatu dapat menjadi pemimpin di kawasan Pasifik Selatan, atau dugaan lainnya Vanuatu memanfaatkan isu ini untuk menaikkan prestisenya di tatanan sistem internasional sehingga menjadi perhatian internasional. Dari semua penjelesaian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Kepentingan Vanuatu Dalam Internasionalisasi Papua melalui Melanesian Spearhead Group (MSG)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis telah menjabarkan lingkup penelitian berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi secara singkat sebelumnya. Dari uraian singkat latar belakang tersebut, penulis menentukan dua rumusan masalah penelitian:

1. Mengapa Vanuatu melakukan internasionalisasi isu Papua melalui Melanesian Spearhead Group (MSG)?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan Vanuatu untuk mewujudkan kepentingannya dengan melakukan internasionalisasi isu Papua melalui Melanesian Spearhead Group (MSG)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis serta menjelaskan terkait upaya yang telah dilakukan oleh Vanuatu dalam mendukung kelompok separatis Papua dan aktivis-aktivis pro Papua merdeka untuk menarik perhatian masyarakat internasional. Sampai saat ini Vanuatu kerap mencari dukungan tambahan kepada negara-negara lain agar Papua menjadi negara independen dan dapat melepaskan diri dari Indonesia. Kemudian penulis juga akan meneliti respons dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan khususnya negara-negara yang tergabung di MSG dalam menanggapi internasionalisasi isu Papua.

Penulis juga ingin mengidentifikasi faktor yang melatar belakangi Vanuatu dalam upayanya menginternasionalisasikan isu Papua serta apa kepentingan dibalik konsistennya Vanuatu membantu menyuarkan kemerdekaan Papua, apakah murni hanya untuk membantu Papua agar dapat melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara independen atau Vanuatu memiliki kepentingan lain yang dapat menguntungkan mereka dan penulis akan menganalisis bagaimana Vanuatu menggunakan MSG sebagai alat untuk menyuarkan kepentingan nasionalnya.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan yang dapat diberikan dari dilakukannya penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Vanuatu untuk menginternasionalisasikan isu Papua dengan menggunakan organisasi regional, sehingga mahasiswa/i di ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan untuk dapat memahami *national interest* dari Vanuatu. Selain itu melalui penelitian ini dapat memberikan

sumbangan pemikiran serta informasi terbaru untuk dapat membantu memberikan manfaat bagi para cendekiawan dan para praktisi peminat Hubungan Internasional yang sedang meneliti kepentingan Vanuatu dalam internasionalisasi Isu Papua melalui MSG.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Terdapat lima bagian dari sistematika penulisan dalam penelitian ini. Bagian-bagian tersebut meliputi:

**BAB I** : Bagian ini menjelaskan latar belakang serta ruang lingkup penelitian ini. Latar belakang menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan Vanuatu dalam menginternasionalisasikan isu Papua dengan menggunakan media seperti organisasi regional yaitu MSG. Dalam bagian ini juga, penulis menyajikan satu pertanyaan penelitian untuk dapat mengkaji topik tersebut. Tujuan, kegunaan dan sistematika penulisan juga tercantum dalam bagian ini.

**BAB II** : Pada bagian ini, penulis menyajikan tinjauan pustaka yang merupakan hasil penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka memuat mengenai sudut pandang penulis lainnya yang telah lebih dahulu membahas topik penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Selain itu, terdapat teori serta konsep-konsep untuk dapat membantu menganalisis penelitian ini.

**BAB III** : Bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, termasuk pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Pada bagian ini, rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya akan dibahas. Penulis akan menguraikan hasil analisis penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepentingan Vanuatu dalam menginternasionalisasikan isu Papua melalui MSG.

**BAB V** : Bagian terakhir dari penelitian ini adalah kesimpulan serta saran dari penulis mengenai topik penelitian yang telah dibahas.

